

**LAPORAN TESIS**  
**IMPLEMENTASI *HOSPITAL BY LAWS* BAGI DOKTER**  
**SUBSPESIALIS DI RSUP DR. KARIADI SEMARANG DALAM**  
**PELAYANAN KESEHATAN**



dr. Melisa Parida Djayanty Panjaitan  
21C20033

PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM KESEHATAN  
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA  
SEMARANG

2024

**LAPORAN TESIS**  
**IMPLEMENTASI *HOSPITAL BY LAWS* BAGI DOKTER SUBSPESIALIS**  
**DI RSUP DR. KARIADI SEMARANG DALAM PELAYANAN**  
**KESEHATAN**

Diajukan dalam Rangka Memenuhi  
Salah Satu Syarat Memperoleh  
Gelar Magister Ilmu Hukum Kesehatan



dr. Melisa Parida Djayanty Panjaitan  
21C20033

PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM KESEHATAN  
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA  
SEMARANG  
2024

## ABSTRAK

Penelitian dengan judul “Implementasi *Hospital byLaws* Bagi Dokter Subspesialis di RSUP Dr. Kariadi Semarang dalam Pelayanan Kesehatan” bertujuan untuk mengetahui pengaturan *Hospital byLaws*, mengetahui implementasi *Hospital byLaws* dalam pelayanan kesehatan bagi dokter subspesialis, dan mengetahui faktor yang mempengaruhi implementasi *Hospital byLaws* bagi dokter subspesialis di RSUP Dr. Kariadi. UU No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan menjelaskan bahwa Rumah Sakit merupakan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan perseorangan secara paripurna melalui Pelayanan Kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/ atau paliatif dengan penyediaan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.

Metode pendekatan yuridis sosiologis dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis merupakan metode yang digunakan dalam penelitian. Data primer dan sekunder digunakan dalam penelitian ini. Metode pengumpulan data berupa studi kepustakaan, yang dilakukan dengan pengumpulan dan pemahaman mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku, buku, literatur, jurnal, dan dokumen yang lain; dan studi lapangan berupa wawancara dengan pihak yang dapat memberikan informasi mengenai tujuan penelitian ini.

Hasil penelitian menunjukkan dasar hukum pengaturan HBL RSUP Dr. Kariadi belum mengacu pada UU No.17 tahun 2023 tentang Kesehatan dan masih menggunakan dasar hukum yang lama, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, UU No.29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, UU No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Bentuk pengaturan HBL RSUP Dr. Kariadi terdiri dari pengaturan umum dan pengaturan khusus. Mekanisme implementasi HBL terdiri dari 3 tahapan, yaitu tahapan pengorganisasian, interpretasi, dan implikasi. Pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi HBL adalah Pemilik, Dewan Pengawas Rumah Sakit, Direksi, Komite Audit, Komite Medik, Komite Etik dan Hukum, Komite Keperawatan, Komite Mutu Rumah Sakit, Komite Koordinasi Pendidikan, Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi, Komite Etik Penelitian Kesehatan, Satuan Pemeriksaan Internal, dan Kelompok Staf Medis. Faktor yuridis, teknis, dan sosiologis mempengaruhi implementasi HBL.

**Kata Kunci:** *hospital by laws*, implementasi, pelayanan kesehatan, dokter subspesialis

## ABSTRACT

Research with the title "Implementation of Hospital by Laws for Subspecialist Doctors at RSUP Dr. Kariadi Semarang in Health Services" aims to find out the arrangements for Hospital by Laws, find out the implementation of Hospital by Laws in health services for subspecialist doctors, and find out the factors that influence the implementation of Hospital by Laws for subspecialist doctors at RSUP Dr. Kariadi. Law no. 17 of 2023 concerning Health explains that a hospital is a health service facility that provides complete individual health services through promotive, preventive, curative, rehabilitative and/or palliative health services by providing inpatient, outpatient and emergency services.

The sociological juridical approach method with analytical descriptive research specifications is the method used in the research. Primary and secondary data were used in this research. The data collection method is a literature study, which is carried out by collecting and understanding applicable laws and regulations, books, literature, journals and other documents; and field studies in the form of interviews with parties who can provide information regarding the objectives of this research.

The research results show that the legal basis for regulating HBL at RSUP Dr. Kariadi has not referred to Law No.17 of 2023 concerning Health and is still using the old legal basis, are the 1945 Constitution, Law No.29 of 2004 concerning Medical Practice, Law No.36 of 2009 concerning Health, Law no. 44 of 2009 concerning Hospitals. Form of HBL arrangement at RSUP Dr. Kariadi consists of general settings and special settings. The HBL implementation mechanism consists of 3 stages, namely the organizing, interpretation and implication stages. The parties involved in implementing HBL are the Owner, Hospital Supervisory Board, Board of Directors, Audit Committee, Medical Committee, Ethics and Legal Committee, Nursing Committee, Hospital Quality Committee, Education Coordination Committee, Infection Prevention and Control Committee, Research Ethics Committee Health, Internal Examination Unit, and Medical Staff Group. Juridical, technical and sociological factors influence the implementation of HBL.

**Keywords:** hospital by law, implementation, health services, subspecialist doctors